

## **Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Umat: Telaah Integratif antara Indikator Pendapatan Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah**

**Arifa Pratami<sup>1</sup>**

Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
arifa@fai.uisu.ac.id

**Ismail**

Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Ismail@fai.uisu.ac.id

**Nurhudawi**

Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
nhudawi@fai.uisu.ac.id

**Annisa Aulia**

Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
annisaauliaa57@gmail.com

<b>Submission</b>	<b>Accepted</b>	<b>Published</b>
20 Juni 2025	31 Desember 2025	31 Desember 2025

### **Abstract**

*This study aims to analyze the relationship between economic growth and community welfare through an integrative approach that combines national income indicators with Islamic economic principles based on maqasid al-shariah. This article constitutes a library-based study employing a qualitative approach, with descriptive analysis as the primary methodology. The findings indicate that conventional economic growth indicators such as Gross Domestic Product (GDP), Gross National Product (GNP), and per capita income do not fully reflect comprehensive community welfare, as they tend to overlook dimensions of distributive justice, ethics, and social benefit. The integration of macroeconomic indicators with maqasid al-shariah-based welfare parameters is therefore considered capable of providing a more holistic, inclusive, and welfare-oriented framework for development evaluation, aimed at achieving falah for the community.*

**Keywords:** Economic Growth, National Income, Ummah.

---

<sup>1</sup> Corresponding Author

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat melalui pendekatan integratif yang memadukan indikator pendapatan nasional dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah berbasis maqashid syariah. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi konvensional seperti PDB, PNB, dan pendapatan per kapita belum sepenuhnya merefleksikan kesejahteraan umat secara komprehensif karena mengabaikan dimensi keadilan distributif, etika, dan kebermanfaatn sosial. Integrasi indikator makroekonomi dengan parameter kesejahteraan syariah berbasis maqashid syariah dinilai mampu memberikan kerangka evaluasi pembangunan yang lebih utuh, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian fahlah umat.

**Kata kunci:** Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Nasional, Umat.

## Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran utama dalam menilai keberhasilan pembangunan sebuah negara. Indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Nasional Bruto (PNB), serta pendapatan per kapita telah lama digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran nasional (Freitas Marcal et al., 2024). Peningkatan angka-angka tersebut sering dijadikan bukti bahwa aktivitas ekonomi berjalan baik dan produktivitas masyarakat meningkat. Namun demikian, indikator pertumbuhan ekonomi sering kali hanya menggambarkan kondisi makro secara agregat, bukan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi tinggi tidak otomatis menghapus kemiskinan, menurunkan pengangguran, atau mempersempit ketimpangan pendapatan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai apakah instrumen pengukuran konvensional benar-benar mampu menangkap realitas kesejahteraan secara utuh. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, kebutuhan untuk memperluas paradigma evaluasi pembangunan menjadi semakin mendesak, terutama di negara dengan populasi Muslim besar seperti Indonesia.

Dalam perspektif ekonomi syariah, kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sisi materi, tetapi juga dari terpenuhinya nilai-nilai maqashid syariah penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Alvin Algifari, 2024). Konsep ini menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan dan memandang keberhasilan ekonomi sebagai instrumen menuju fahlah atau kebahagiaan yang komprehensif. Karena itu, ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan distributif, pemerataan, dan pengelolaan sumber daya yang etis sebagai dasar pengukuran kesejahteraan. Pendekatan ini berbeda dari indikator pendapatan nasional yang cenderung bersifat kuantitatif dan materialistik. Sementara PDB dan pendapatan per kapita mengukur besaran output ekonomi, syariah memberikan perhatian pada bagaimana output tersebut didistribusikan serta sejauh mana ia mampu meningkatkan martabat manusia. Dengan demikian, terdapat ruang

integrasi yang signifikan antara indikator ekonomi konvensional dan prinsip syariah untuk menciptakan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kesejahteraan umat.

Idealnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus beriringan dengan peningkatan kemaslahatan masyarakat, distribusi pendapatan yang adil, serta akses yang setara terhadap peluang ekonomi. Pertumbuhan juga seharusnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan mengurangi kerentanan sosial. Demikian pula, prinsip-prinsip syariah idealnya terintegrasi dalam kebijakan pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi menghasilkan nilai tambah yang tidak hanya bersifat materi, tetapi juga moral, spiritual, dan social ( Hidayah et al., 2024). Namun realitasnya, tren pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa peningkatan PDB sering kali tidak berdampak signifikan terhadap pemerataan kesejahteraan. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan tetap tinggi, ketersediaan lapangan kerja berkualitas masih terbatas, dan akses terhadap layanan ekonomi belum merata. Di sisi lain, implementasi prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas teori dengan kondisi empiris di lapangan.

Kesenjangan inilah yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini, yaitu belum adanya pendekatan integratif yang menyatukan indikator pendapatan nasional dengan prinsip-prinsip kesejahteraan dalam perspektif syariah. Penggunaan indikator konvensional secara tunggal berpotensi menghasilkan analisis yang bias karena hanya menyoroti sisi kuantitas pertumbuhan tanpa melihat dimensi etis, distribusi, dan kebermanfaatan sosial. Sebaliknya, pendekatan syariah yang sangat menekankan keadilan dan pemerataan membutuhkan kerangka analisis kuantitatif agar dapat diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian, integrasi kedua pendekatan ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pertumbuhan ekonomi seharusnya berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat melalui pendekatan integratif yang memadukan indikator pendapatan nasional dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi telah berjalan inklusif dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Adapun kontribusi penelitian ini adalah memberikan perspektif konseptual dan praktis mengenai perlunya integrasi antara indikator ekonomi konvensional dengan parameter syariah dalam menilai pembangunan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur ekonomi syariah dengan menawarkan kerangka evaluasi baru yang lebih komprehensif. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Kajian mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat dalam perspektif ekonomi syariah bukanlah tema yang benar-

benar baru dalam literatur akademik Indonesia. Penelitian yang ditulis oleh Rizka Widyaningtias berjudul; *"Pengaruh Pembangunan Ekonomi Islam dengan Kesejahteraan Masyarakat Islam di Indonesia,"* yang memfokuskan pembahasannya pada peran lembaga-lembaga filantropi Islam seperti BAZNAS, LAZ, dan lembaga wakaf dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karya ini menggunakan pendekatan literatur dan analisis data sekunder untuk menggambarkan kontribusi instrumen ZISWAF terhadap pengentasan kemiskinan serta tantangan pengelolaan dana filantropi di Indonesia (Aina Aulia et al., 2024). Persamaan karya tersebut dengan penelitian ini terletak pada kesamaan tujuan untuk memahami bagaimana instrumen ekonomi syariah dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Namun perbedaannya cukup jelas karena karya tersebut lebih menekankan efektivitas institusi filantropi, sedangkan penelitian ini berupaya menghubungkan indikator makroekonomi secara langsung dengan indikator kesejahteraan syariah sehingga sifat kajiannya lebih integratif dan analitis.

Muhammad Alfi Syahrin dalam publikasi yang berjudul; *"Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah,"* yang menawarkan kajian konseptual mengenai hakikat kesejahteraan menurut prinsip-prinsip maqashid al-syariah (Syahrin et al., 2022). Penelitian ini memaparkan bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya bergantung pada aspek material, tetapi juga mencakup keseimbangan spiritual, moral, dan sosial. Penulis menjelaskan bahwa instrumen syariah seperti zakat, infaq, dan wakaf dapat berperan sebagai mekanisme distribusi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih adil. Dari sisi kesesuaian, penelitian ini memiliki arah yang serupa dengan penelitian penulis dalam hal menekankan bahwa kesejahteraan umat harus mencakup aspek spiritual dan sosial, bukan hanya pertumbuhan ekonomi secara agregat. Namun perbedaannya terletak pada pendekatan: karya Syahrin bersifat teoretis-konseptual, sedangkan penelitian ini berusaha menerjemahkan konsep-konsep maqashid tersebut ke dalam indikator kuantitatif yang dapat diukur dan diuji secara empiris bersama indikator pendapatan nasional.

Sunarji Harahap dalam karyanya yang berjudul; *"Peran Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kreatif sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi,"* yang berfokus pada kemampuan sektor ekonomi syariah dan ekonomi kreatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Harahap, 2024). Penulis menyajikan perkembangan sektor halal, industri kreatif, dan perbankan syariah sebagai motor pertumbuhan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor riil. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi harus dihubungkan dengan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan. Namun perbedaannya adalah bahwa karya Harahap berfokus pada dinamika sektoral dan kebijakan industri halal, bukan pada integrasi indikator pendapatan nasional dengan indikator kesejahteraan syariah sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini.

Setelah dilakukan tinjauan pustaka, tampak adanya gap penelitian yang signifikan. Pertama, belum ada penelitian yang secara komprehensif membangun model indikator integratif yang menyatukan pengukuran pertumbuhan ekonomi (PDB, PNB, pendapatan per kapita) dengan indikator kesejahteraan maqashid dalam bentuk yang terukur dan dapat diuji secara empiris. Kedua, penelitian berbasis data yang menguji hubungan kuantitatif antara pertumbuhan ekonomi

dan kesejahteraan berbasis syariah masih sangat terbatas. Banyak penelitian menyediakan analisis deskriptif atau normatif, tetapi belum menghadirkan bukti statistik mengenai sejauh mana pertumbuhan ekonomi benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan falah umat. Ketiga, belum terdapat kajian longitudinal yang mengevaluasi efektivitas instrumen syariah seperti zakat produktif, dana wakaf, dan pembiayaan mikro syariah terhadap peningkatan kesejahteraan jangka panjang, terutama bila dikaitkan dengan indikator makro nasional. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjembatani gap tersebut dengan menyajikan analisis integratif yang menyelaraskan indikator pendapatan nasional dengan indikator kesejahteraan syariah.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menganalisis keterkaitan antara indikator-indikator pendapatan nasional dan prinsip ekonomi syariah dalam mengukur kesejahteraan umat (Malahati et al., 2023). Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif. Sumber primer penelitian ini terdiri dari karya-karya ilmiah yang secara langsung membahas pertumbuhan ekonomi, maqashid syariah, kesejahteraan umat, dan integrasi ekonomi syariah dalam pengembangan indikator pembangunan. Sementara itu, sumber sekunder meliputi data publikasi BPS, BI, OJK, BAZNAS, laporan pemerintah, artikel pendukung, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan secara tidak langsung dengan topik utama. Analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema kunci, pola hubungan antarvariabel, serta integrasi konsep ekonomi konvensional dan syariah. Validitas dan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur dari jurnal, laporan lembaga resmi, dan karya akademik yang kredibel guna memastikan konsistensi konsep dan argumentasi.

### **Konsep Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Pendapatan Nasional**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk melihat perkembangan suatu negara dalam jangka panjang. Konsep ini menggambarkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dari waktu ke waktu, yang biasanya diukur melalui perubahan nilai pendapatan nasional (Freitas Marcal et al., 2024). Dalam ilmu ekonomi modern, pertumbuhan dianggap sebagai fondasi utama bagi pembangunan karena memungkinkan peningkatan standar hidup masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai sekadar peningkatan angka statistik, melainkan merupakan proses multidimensional yang berkaitan dengan perubahan struktural, peningkatan produktivitas, dan efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai indikator pendapatan nasional menjadi penting karena indikator tersebut menggambarkan sejauh mana aktivitas ekonomi berlangsung dalam suatu periode tertentu.

Pendapatan nasional pada dasarnya merujuk pada total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun. Dua ukuran yang paling sering digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB). PDB mengukur total produksi yang terjadi dalam wilayah geografis suatu negara tanpa memperhatikan kepemilikan

faktor produksi. Sementara itu, PNB mengukur output dari seluruh warga negara, termasuk pendapatan yang diperoleh dari luar negeri. Kedua indikator ini memberikan gambaran yang berbeda namun saling melengkapi dalam melihat aktivitas ekonomi nasional. Pemahaman mengenai konsep ini penting untuk analisis makroekonomi, pengambilan kebijakan, dan perbandingan kinerja ekonomi antar negara.

Dalam konsep PDB, penghitungan dilakukan dengan menjumlahkan seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara. PDB dapat dihitung melalui tiga pendekatan: pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi menghitung total nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi (Ulfa, 2023). Pendekatan pendapatan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi, seperti upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Sementara pendekatan pengeluaran menjumlahkan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Ketiga pendekatan ini pada teori akan menghasilkan angka yang sama karena merupakan tiga sudut pandang terhadap transaksi ekonomi yang sama.

Produk Nasional Bruto (PNB) sedikit berbeda dari PDB karena memperhitungkan kepemilikan faktor produksi oleh warga negara, baik di dalam maupun luar negeri. PNB dihitung dari PDB ditambah pendapatan faktor produksi dari luar negeri dikurangi pendapatan faktor produksi asing di dalam negeri. Misalnya, jika banyak tenaga kerja suatu negara bekerja di luar negeri dan mengirimkan remitansi, hal itu akan meningkatkan PNB. Sebaliknya, jika produksi domestik didominasi oleh perusahaan asing yang mengirim keuntungan ke negaranya, maka PNB akan lebih rendah daripada PDB. Perbedaan ini menjadikan PNB indikator yang lebih relevan untuk melihat sejauh mana masyarakat suatu negara secara langsung menikmati hasil pembangunan ekonomi.

Selain PDB dan PNB, indikator yang sering digunakan untuk menilai kesejahteraan ekonomi penduduk adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita diperoleh dengan membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Meskipun tidak secara langsung mencerminkan distribusi pendapatan, indikator ini memberikan gambaran rata-rata kemampuan ekonomi masyarakat (Ulfa, 2023). Negara dengan pendapatan per kapita tinggi umumnya memiliki standar hidup lebih baik, walaupun ketimpangan pendapatan bisa membuat angka tersebut menyesatkan. Penggunaan pendapatan per kapita sebagai indikator kesejahteraan harus disertai dengan analisis lain, seperti koefisien Gini dan tingkat kemiskinan.

Metode pengukuran pendapatan nasional sebenarnya telah mengalami perkembangan dan standarisasi internasional, terutama melalui sistem SNA (*System of National Accounts*). SNA memberikan pedoman yang seragam bagi negara-negara dalam mengukur aktivitas ekonomi, sehingga memudahkan perbandingan internasional. Namun, proses pengumpulan data tetap menghadapi berbagai tantangan, terutama di negara berkembang yang memiliki sektor informal besar. Aktivitas informal sulit didata karena tidak tercatat dalam sistem administrasi pemerintah, padahal kontribusinya terhadap perekonomian nyata cukup besar. Keterbatasan data ini dapat menyebabkan pendapatan nasional tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.

Selain tantangan data, pengukuran pendapatan nasional juga menghadapi masalah konseptual. Misalnya, indikator seperti PDB tidak memperhitungkan kualitas lingkungan, distribusi pendapatan, tingkat kebahagiaan, maupun kegiatan rumah tangga yang tidak diperdagangkan. Akibatnya, negara dapat mencatat pertumbuhan PDB yang tinggi, tetapi masyarakatnya belum tentu merasakan peningkatan kesejahteraan (Harahap, 2024). Begitu pula biaya sosial dari pembangunan, seperti polusi dan kerusakan sumber daya alam, tidak dikurangkan dari perhitungan. Kekurangan-kekurangan ini mendorong munculnya gagasan indikator alternatif seperti Human Development Index (HDI) dan Green GDP.

Dalam analisis makroekonomi, pendapatan nasional memiliki fungsi strategis sebagai dasar pengambilan kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah menggunakan data PDB untuk menentukan target pertumbuhan, merumuskan kebijakan anggaran, dan menilai efektivitas kebijakan yang sudah diimplementasikan. Bank sentral memanfaatkan data pertumbuhan ekonomi untuk memutuskan kebijakan suku bunga, pengendalian inflasi, serta stabilitas makro. Indikator pendapatan nasional juga memberikan informasi penting bagi investor dan pelaku usaha tentang prospek pasar suatu negara. Dengan demikian, pendapatan nasional bukan hanya angka statistik, tetapi menjadi alat analisis dalam merancang arah perekonomian.

Relevansi pendapatan nasional semakin terlihat ketika digunakan untuk menilai struktur ekonomi suatu negara. Misalnya, PDB dapat menunjukkan kontribusi sektor primer, sekunder, dan tersier terhadap total produksi nasional. Perubahan kontribusi antar sektor mencerminkan transformasi struktural ekonomi, seperti pergeseran dari sektor pertanian menuju industri dan jasa. Analisis struktur ini penting untuk memahami tingkat modernisasi ekonomi dan daya saing internasional. Selain itu, pendapatan nasional dapat mencerminkan ketergantungan ekonomi terhadap ekspor komoditas, yang berdampak pada kerentanan terhadap fluktuasi harga global.

Di sisi lain, pendapatan nasional juga memiliki peran dalam pengukuran produktivitas tenaga kerja. Dengan membandingkan total output terhadap jumlah pekerja, kita dapat menilai efisiensi sistem produksi suatu negara. Produktivitas yang tinggi menunjukkan penggunaan teknologi yang maju, tenaga kerja berkualitas, dan manajemen yang efektif. Hal ini penting karena produktivitas merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Negara dengan produktivitas rendah akan sulit meningkatkan pendapatan masyarakat, meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah. Oleh sebab itu, indikator pendapatan nasional juga menjadi alat untuk menilai kualitas faktor produksi (Harahap, 2024).

Meskipun demikian, para ekonom mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan pendapatan nasional tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran pembangunan. Pertumbuhan yang tidak inklusif, misalnya hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, dapat menyebabkan ketimpangan sosial yang semakin melebar. Dalam konteks ini, pendapatan nasional harus dilengkapi dengan indikator distribusi seperti rasio Gini, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Analisis yang lebih mendalam dibutuhkan agar kebijakan publik benar-benar menyentuh sisi keadilan sosial. Dengan demikian, indikator pendapatan nasional hanya menjadi salah satu unsur dalam kerangka analisis yang lebih komprehensif.

## **Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pengukuran Kesejahteraan**

Ekonomi syariah hadir sebagai suatu sistem yang tidak hanya menilai aktivitas ekonomi dari sisi materi, tetapi juga dari sisi moral, sosial, dan spiritual. Dalam kerangka syariah, kesejahteraan tidak semata-mata dipahami sebagai peningkatan pendapatan atau konsumsi, melainkan sebagai tercapainya kemaslahatan hidup yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pengukuran kesejahteraan dalam perspektif syariah memerlukan instrumen yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani. Pendekatan ini menjadi pembeda utama antara ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung menekankan aspek material. Oleh sebab itu, pembahasan prinsip-prinsip syariah sangat penting dalam menganalisis kesejahteraan secara komprehensif.

Salah satu fondasi utama dalam pengukuran kesejahteraan ekonomi syariah adalah konsep maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan dasar yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Maqashid syariah mencakup perlindungan terhadap lima aspek pokok: agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*) (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Kesejahteraan sejati dianggap tercapai apabila lima aspek ini dapat terjamin dan berkembang dalam kehidupan seseorang. Dalam konteks ekonomi, maqashid syariah menuntut adanya sistem yang menjamin pemerataan peluang, keamanan harta, keberlanjutan hidup, dan terhindarnya masyarakat dari eksploitasi. Oleh karena itu, pengukuran kesejahteraan harus mempertimbangkan apakah aktivitas ekonomi memberikan kemaslahatan atau justru mendatangkan mudarat bagi masyarakat.

Selain maqashid syariah, prinsip keadilan distributif menjadi pilar lainnya dalam pengukuran kesejahteraan. Ekonomi syariah menekankan bahwa kekayaan tidak boleh berputar di kalangan orang-orang kaya saja, sebagaimana pesan Al-Qur'an dalam Surah Al-Hasyr ayat 7. Distribusi yang adil tidak berarti pembagian yang sama rata, melainkan pembagian yang proporsional, meminimalkan ketimpangan, dan memberikan peluang yang setara. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan kewajiban sosial lainnya menjadi sarana utama untuk memastikan terciptanya keadilan tersebut. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan dalam ekonomi syariah tidak hanya dilihat dari besarnya pendapatan nasional, tetapi juga dari bagaimana distribusi kekayaan tersebut terjadi.

Larangan riba merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi syariah karena dianggap merusak keadilan ekonomi dan menyebabkan ketimpangan (Rangkuti, 2024). Sistem berbasis bunga cenderung menguntungkan mereka yang memiliki modal besar dan membebani pihak yang lemah, sehingga menciptakan ketidakadilan struktural. Syariah menilai bahwa transaksi yang menghasilkan keuntungan tanpa risiko dan tanpa kontribusi nyata terhadap aktivitas produktif adalah bentuk eksploitasi. Oleh sebab itu, pengukuran keberhasilan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari sejauh mana sistem transaksi terbebas dari riba dan bertumpu pada kegiatan riil. Ekonomi yang sehat menurut syariah adalah ekonomi yang mendorong produktivitas, bukan sekadar akumulasi kekayaan melalui mekanisme bunga.

Selain riba, syariah juga melarang praktik gharar, yakni ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi. Gharar dapat menimbulkan ketidakpastian dan konflik karena pihak-pihak yang terlibat tidak memperoleh informasi yang memadai tentang objek transaksi. Dalam konteks pengukuran kesejahteraan, keberadaan gharar menunjukkan bahwa sistem ekonomi masih belum transparan dan belum mendukung perdagangan yang adil. Pengurangan gharar melalui regulasi yang jelas, informasi yang transparan, dan dokumentasi yang baik menjadi bagian dari strategi syariah dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan aman bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Larangan lainnya adalah maysir, yaitu segala bentuk perjudian atau spekulasi berlebihan yang tidak menghasilkan nilai tambah riil. Aktivitas maysir dapat menciptakan volatilitas ekonomi dan mendorong masyarakat mengejar keuntungan instan tanpa usaha produktif. Sebagai contoh, spekulasi finansial yang tidak berbasis aset riil dianggap dapat merusak stabilitas pasar karena menyebabkan gelembung harga (*bubbles*). Karena itu, dalam pengukuran kesejahteraan, ekonomi syariah menilai tingkat keberhasilan suatu negara tidak dari tingginya transaksi finansial semata, tetapi dari sejauh mana transaksi tersebut berkaitan dengan sektor riil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Harahap, 2024).

Prinsip-prinsip larangan seperti riba, gharar, dan maysir menunjukkan bahwa ekonomi syariah mengutamakan integritas dan kepastian transaksi, yang berpengaruh langsung pada kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi yang bebas dari unsur-unsur tersebut akan meminimalkan eksploitasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong stabilitas keuangan jangka panjang. Dalam perspektif kesejahteraan, masyarakat yang terlindungi dari praktik merugikan memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang secara ekonomi. Oleh sebab itu, keberhasilan ekonomi menurut syariah tidak dapat dilepaskan dari sejauh mana pasar berjalan secara transparan, etis, dan bebas dari manipulasi.

Konsep *falah*, atau kebahagiaan dan keberhasilan dunia-akhirat, menjadi tujuan akhir dalam ekonomi syariah. *Falah* tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga ketenangan jiwa, keharmonisan sosial, dan keberkahan rezeki. Dalam konteks pengukuran kesejahteraan, *falah* menjadi parameter tambahan yang melengkapi indikator-indikator ekonomi klasik (Ulfa, 2024). Dengan kata lain, suatu masyarakat dapat dikatakan sejahtera bila kehidupannya tidak hanya makmur secara ekonomi, tetapi juga berkualitas secara moral, spiritual, dan sosial. Hal ini memberikan perspektif yang jauh lebih luas dibandingkan indikator konvensional seperti PDB atau pendapatan per kapita.

Ekonomi syariah memandang keberhasilan ekonomi dari sudut pandang kemaslahatan, bukan semata-mata pertumbuhan angka statistik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak selaras dengan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, dianggap sebagai pertumbuhan yang tidak berkualitas. Oleh karena itu, pengukuran kesejahteraan dalam ekonomi syariah memerlukan pendekatan yang integratif, yang menggabungkan indikator makroekonomi seperti pendapatan nasional dengan indikator etis dan sosial. Dengan demikian, sistem ekonomi yang sukses adalah sistem yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan, memberikan keadilan distribusi, mengurangi eksploitasi, dan menciptakan harmoni sosial.

## **Analisis Integratif antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan menurut Perspektif Syariah**

Analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat merupakan isu sentral dalam kajian pembangunan modern. Dalam ekonomi konvensional, pertumbuhan biasanya diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB), yang dianggap sebagai indikator keberhasilan ekonomi suatu negara. Namun, indikator tersebut sering kali tidak cukup menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh, terutama dalam masyarakat yang beragam struktur ekonominya (Harahap, 2024). Pada titik ini, perspektif ekonomi syariah menghadirkan pendekatan integratif yang menilai pertumbuhan bukan hanya berdasarkan angka statistik, tetapi juga kualitas distribusi, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, analisis integratif diperlukan untuk memahami bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraan umat sesuai nilai-nilai syariah.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menunjukkan kapasitas suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa yang meningkat dari waktu ke waktu. Namun, pertumbuhan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Banyak negara dengan PDB tinggi tetap menghadapi tingginya kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta rendahnya kualitas hidup (Karimah et al., 2025). Dalam hal ini, perspektif syariah memberikan kritik bahwa pertumbuhan materi tanpa keseimbangan spiritual dan sosial hanya akan menghasilkan ketimpangan struktural. Sehingga, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas menurut syariah adalah pertumbuhan yang mencakup pemerataan akses, keberlanjutan lingkungan, keadilan distribusi, dan terhindar dari praktik ekonomi yang merusak seperti riba, gharar, dan maysir.

Indikator pendapatan nasional seperti PDB dan PNB tetap penting digunakan karena memberikan gambaran umum mengenai aktivitas ekonomi. Namun dalam kerangka syariah, indikator tersebut harus diinterpretasikan secara lebih komprehensif. Ketika PDB meningkat, pertanyaan utama yang perlu diajukan bukan hanya; *"Seberapa besar pertumbuhan terjadi,"* tetapi juga *"Siapa yang merasakan manfaatnya?"* Jika pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada kelompok elit atau sektor tertentu, maka peningkatan tersebut tidak mencerminkan kesejahteraan syariah. Oleh karena itu, PDB perlu dianalisis bersama indikator lain seperti redistribusi kekayaan, tingkat kemiskinan, akses pendidikan, dan peluang usaha halal.

Ekonomi syariah memandang bahwa pertumbuhan ekonomi hanya bernilai bila mampu meningkatkan kesejahteraan kolektif, bukan hanya pendapatan nasional. Kesejahteraan syariah mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar, tercapainya keadilan sosial, dan meningkatnya kualitas hidup secara menyeluruh. Dalam konteks maqashid syariah, nilai pertumbuhan dievaluasi berdasarkan kontribusinya dalam melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat (Harahap, 2024). Bila pertumbuhan ekonomi menghasilkan kerusakan moral, eksploitasi tenaga kerja, pengrusakan lingkungan, dan penumpukan kekayaan pada kelompok kecil, maka pertumbuhan tersebut bertentangan dengan prinsip maqashid. Oleh karena itu, integrasi indikator makroekonomi dengan nilai-nilai syariah menjadi kebutuhan mutlak dalam analisis pembangunan.

Salah satu kritik terbesar terhadap indikator pendapatan nasional adalah ketidakmampuannya menangkap tingkat kesenjangan pendapatan (*income inequality*). Dua negara dapat memiliki PDB yang sama, tetapi tingkat kesejahteraannya sangat berbeda bila distribusi kekayaannya tidak merata. Dalam perspektif syariah, kesenjangan ekstrem bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan moral dan sosial. Ketimpangan yang lebar dapat menimbulkan kecemburuan sosial, melemahkan solidaritas, menghambat mobilitas ekonomi, serta menimbulkan ketidakstabilan masyarakat. Oleh karena itu, analisis integratif meminta agar pertumbuhan ekonomi selalu diuji terhadap seberapa jauh ia mempengaruhi pemerataan kekayaan.

Distribusi pendapatan menjadi salah satu aspek yang paling ditekankan dalam ekonomi syariah. Prinsip keadilan distributif menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh berputar hanya pada golongan tertentu, melainkan harus tersebar secara proporsional. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi mekanisme yang didesain untuk mengurangi ketimpangan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan demikian, keberhasilan ekonomi bukan hanya dilihat dari pertumbuhan PDB, tetapi dari sejauh mana sistem redistribusi berjalan efektif (Ulfa, 2024). Negara yang memiliki pertumbuhan tinggi namun distribusi yang buruk dianggap belum berhasil menurut paradigma syariah.

Dalam perspektif integratif, indikator pendapatan nasional harus dianalisis bersama variabel sosial lain yang mencerminkan nilai syariah. Misalnya, peningkatan PDB harus dibarengi dengan menurunnya angka kemiskinan absolut, bertambahnya akses terhadap layanan pendidikan berkualitas, meningkatnya kesempatan kerja yang halal, serta tersedianya fasilitas kesehatan yang merata. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya memperbesar ukuran “kue nasional,” tetapi juga memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memperoleh bagian yang layak. Analisis seperti ini memberikan gambaran lebih komprehensif tentang kualitas pertumbuhan dalam kacamata syariah.

Perspektif syariah juga menekankan pentingnya aktivitas ekonomi yang berbasis sektor riil, bukan sektor spekulatif. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh spekulasi, riba, dan aktivitas non-produktif cenderung rapuh dan tidak berkelanjutan. Krisis keuangan global menjadi contoh nyata bagaimana ekonomi yang bertumpu pada spekulasi dapat runtuh dengan cepat. Oleh karena itu, integrasi nilai syariah dalam menilai pertumbuhan memerlukan analisis apakah pertumbuhan tersebut berasal dari kegiatan yang halal, produktif, dan bernilai tambah riil (Anzaikhan et al, 2025). Jika pertumbuhan hanya berasal dari transaksi finansial spekulatif, maka kualitas kesejahteraannya rendah meskipun PDB meningkat.

Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan juga harus dilihat dari sudut pandang keberlanjutan jangka panjang. Ekonomi syariah menolak pertumbuhan yang merusak lingkungan atau mengorbankan generasi mendatang. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi harus menjaga keseimbangan ekosistem, hemat sumber daya, dan berorientasi pada keberlanjutan. Pertumbuhan yang tidak memperhatikan aspek ini akan menyebabkan kerusakan yang merugikan umat dalam jangka panjang. Dalam kerangka maqashid syariah, menjaga jiwa dan harta generasi masa depan menjadi bagian dari tanggung jawab pembangunan ekonomi.

Analisis integratif juga menekankan pentingnya memperhatikan kelompok rentan seperti fakir miskin, lansia, difabel, dan pekerja berupah rendah. Pertumbuhan ekonomi nasional sering kali tidak berdampak signifikan pada kelompok ini karena keterbatasan akses dan peluang. Perspektif syariah memandang bahwa kesejahteraan umat tidak dapat diukur hanya dari rata-rata pendapatan atau jumlah output nasional, tetapi dari sejauh mana kelompok paling lemah mendapatkan perlindungan dan kesempatan (Harahap, 2024). Semakin tinggi perlindungan terhadap kelompok rentan, semakin tinggi tingkat kesejahteraan syariah suatu negara.

Dengan menghubungkan indikator pendapatan nasional dengan prinsip-prinsip kesejahteraan syariah, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ideal adalah pertumbuhan yang memiliki kualitas sosial, moral, dan spiritual. Pertumbuhan yang berlandaskan keadilan, distribusi yang merata, transparansi pasar, dan etika bisnis yang halal akan menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih kuat. Di dalamnya tercakup nilai-nilai seperti saling tolong-menolong, keberlanjutan, dan amanah dalam pengelolaan sumber daya. Analisis ini membuktikan bahwa ekonomi syariah memberikan kerangka yang lebih lengkap untuk memahami dampak pertumbuhan terhadap kualitas hidup masyarakat.

### **Strategi Penguatan Ekonomi Umat Berbasis Syariah untuk Mendukung Pertumbuhan yang Inklusif**

Strategi penguatan ekonomi umat berbasis syariah merupakan bagian krusial dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks modern, ekonomi syariah tidak lagi dipahami sebatas larangan terhadap praktik riba atau transaksi yang tidak etis, tetapi telah berkembang menjadi model pembangunan yang mengintegrasikan nilai spiritual, sosial, dan ekonomi. Penguatan ekonomi umat membutuhkan pendekatan struktural dan kelembagaan yang mampu menghubungkan potensi masyarakat dengan instrumen-instrumen syariah (Anzaikhan, 2025). Hal ini menjadi penting karena dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi tidak serta merta menjamin pemerataan hasil pembangunan. Dengan demikian, strategi berbasis syariah hadir sebagai kerangka alternatif yang berfokus pada distribusi yang adil, pemberdayaan kelompok rentan, dan percepatan mobilitas ekonomi. Melalui kerangka tersebut, pertumbuhan yang inklusif dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.

Salah satu komponen utama dalam strategi penguatan ekonomi umat adalah optimalisasi instrumen zakat, infak, dan wakaf (JIW) (Widana, 2024). Dalam sejarah ekonomi Islam, ZIW terbukti menjadi mekanisme distribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menstimulasi aktivitas ekonomi masyarakat. Optimalisasi ini bukan hanya terkait peningkatan jumlah penghimpunan, tetapi juga penguatan tata kelola, digitalisasi, dan penyaluran yang produktif. Zakat produktif, misalnya, dapat diarahkan untuk mendukung sektor-sektor riil seperti pertanian, perikanan, dan UMKM berbasis syariah, sehingga menciptakan efek pengganda yang signifikan. Wakaf tunai juga semakin relevan, karena dapat menjadi sumber pembiayaan jangka panjang bagi

pembangunan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat ekonomi mikro. Dengan pengelolaan yang profesional, ZIW mampu menjadi instrumen strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan umat.

Selain ZIW, penguatan peran UMKM syariah menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi bangsa, dan lebih dari 90% pelaku usahanya berada pada sektor mikro dan kecil. Dalam konteks syariah, UMKM yang dikelola dengan prinsip keadilan, transparansi, serta berorientasi pada keberlanjutan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat Islam dapat bersinergi dalam menyediakan pelatihan, akses permodalan, pendampingan, dan inovasi bisnis (Kholifah & Andini, 2024). Hal ini penting mengingat banyak UMKM yang mengalami keterbatasan literasi keuangan, akses perbankan, dan kemampuan digital. Penguatan UMKM syariah diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kapasitas produksi sektor-sektor strategis.

Pembiayaan syariah merupakan pilar lain yang ikut menentukan keberhasilan strategi penguatan ekonomi umat. Berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga, pembiayaan syariah menekankan prinsip bagi hasil, transparansi risiko, dan keadilan. Instrumen seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan usaha produktif. Dengan pola kemitraan tersebut, pelaku usaha tidak terbebani oleh kewajiban bunga tetap, sehingga memiliki ruang lebih luas untuk berkembang. Namun, pembiayaan syariah juga menghadapi sejumlah tantangan seperti terbatasnya penetrasi bank syariah, rendahnya inklusi keuangan, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, perlu upaya sistematis untuk memperluas jaringan layanan pembiayaan syariah, meningkatkan literasi keuangan, dan menciptakan produk-produk inovatif yang mudah diakses oleh masyarakat berpendapatan rendah.

Dalam konteks dunia digital, strategi ekonomi umat harus mempertimbangkan urgensi pembentukan ekosistem ekonomi digital halal. Perkembangan teknologi digital membuka berbagai peluang baru bagi umat, mulai dari marketplace halal, platform crowdfunding syariah, hingga pembayaran digital berbasis akad syariah. Potensi ekonomi digital halal sangat besar karena mampu menghubungkan produsen, konsumen, dan lembaga keuangan dalam satu ekosistem yang efisien dan transparan (Harahap, 2024). Ekosistem ini juga dapat membantu memperluas pasar bagi produk-produk UMKM syariah, baik domestik maupun internasional. Di samping itu, digitalisasi pengelolaan ZIW dapat meningkatkan akuntabilitas dan memperluas jangkauan penerima manfaat. Namun, pengembangan ekosistem digital halal tetap membutuhkan regulasi yang jelas, standar halal yang kuat, serta infrastruktur teknologi yang memadai.

Pembangunan ekonomi umat yang inklusif juga tidak dapat dilepaskan dari konsep pembangunan berkelanjutan menurut perspektif syariah. Berbeda dari pendekatan pembangunan konvensional yang sering berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, syariah melihat pembangunan sebagai proses yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekologis. Dengan demikian,

pembangunan tidak boleh merusak lingkungan, merugikan masyarakat, ataupun menciptakan ketimpangan. Konsep pembangunan berkelanjutan syariah menekankan keseimbangan antara penggunaan sumber daya manusia dan alam dengan tetap menjaga amanah sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, strategi penguatan ekonomi umat harus mempertimbangkan pengembangan sektor-sektor ramah lingkungan seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan industri halal yang minim limbah. Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan keberlangsungan kesejahteraan bagi generasi mendatang.

Dalam rangka mewujudkan strategi penguatan ekonomi umat yang efektif, diperlukan sinergi antara lembaga negara, lembaga keuangan syariah, organisasi masyarakat Islam, dan sektor swasta. Pemerintah perlu menyediakan regulasi yang mendukung pengembangan ekosistem syariah, mulai dari insentif pajak bagi lembaga zakat dan wakaf, kemudahan izin usaha UMKM syariah, hingga peningkatan akses teknologi bagi masyarakat. Lembaga keuangan syariah memiliki peran dalam menyediakan produk pembiayaan yang mudah diakses dan sesuai kebutuhan masyarakat (Ulfa, 2024). Sementara itu, organisasi masyarakat Islam dapat memberikan edukasi, pendampingan, serta menyusun program penguatan ekonomi berbasis komunitas. Sinergi multipihak ini akan menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Strategi penguatan ekonomi umat juga harus memperhatikan pembangunan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Literasi keuangan syariah, keterampilan digital, serta kemampuan inovasi menjadi modal penting bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam ekonomi modern. Program pelatihan dan pendidikan yang terstruktur, baik melalui lembaga formal maupun nonformal, dapat membantu meningkatkan kualitas SDM. Pendidikan terkait kewirausahaan syariah, manajemen usaha, dan teknologi digital perlu diperluas agar masyarakat mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas SDM akan mempercepat proses pemerataan ekonomi dan meningkatkan produktivitas sektor-sektor strategis.

Selain penguatan internal, strategi ekonomi umat juga perlu memperhatikan integrasi dengan ekonomi nasional dan global. Industri halal, misalnya, memiliki potensi ekspor yang besar, mulai dari makanan-minuman, pariwisata halal, hingga kosmetik dan farmasi. Dengan memperkuat standar halal, meningkatkan daya saing produk, dan membuka akses pasar, ekonomi umat dapat menjadi bagian dari rantai pasok global yang bernilai tinggi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan kebijakan ekspor yang mendukung produk-produk halal, serta mendorong kolaborasi internasional dengan negara-negara berpenduduk Muslim besar (Harahap, 2024). Integrasi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global.

### **Studi Empiris Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pemerataan dan Kesejahteraan Umat**

Kajian empiris mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pemerataan dan kesejahteraan masyarakat menjadi aspek penting dalam analisis pembangunan modern. Literatur ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan

ekonomi pada dasarnya meningkatkan kapasitas negara dalam menghasilkan barang dan jasa, namun efeknya terhadap distribusi kesejahteraan tidak selalu seragam. Data dari banyak negara berkembang memperlihatkan bahwa pertumbuhan tinggi tidak otomatis mengurangi angka kemiskinan apabila struktur ekonominya tidak inklusif (Ulfa, 2024). Dalam konteks ini, penelitian empiris diperlukan untuk memahami apakah pertumbuhan benar-benar menyentuh lapisan masyarakat terbawah atau hanya menguntungkan kelompok tertentu. Perspektif syariah kemudian menambahkan dimensi moral dan distributif dalam menilai dampak pertumbuhan tersebut terhadap kesejahteraan umat.

Secara makro, pertumbuhan ekonomi yang stabil umumnya diharapkan menurunkan kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, berbagai studi memperlihatkan adanya perbedaan signifikan antarnegara dalam hal elastisitas pertumbuhan terhadap penurunan kemiskinan. Misalnya, penelitian Bank Dunia menunjukkan bahwa negara dengan tingkat ketimpangan tinggi cenderung memiliki efek penurunan kemiskinan yang lebih kecil meskipun pertumbuhannya tinggi. Hal ini menegaskan bahwa kualitas pertumbuhan—bukan hanya besarnya pertumbuhan memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Tanpa kebijakan redistributif yang efektif, pertumbuhan dapat berjalan tanpa menghasilkan dampak sosial yang berarti.

Empirinya, pertumbuhan ekonomi berperan dalam menekan tingkat pengangguran, namun hubungan ini sering kali tidak linear. Negara-negara dengan pertumbuhan berbasis teknologi atau sektor modal-kapital, misalnya, cenderung mengalami "*jobless growth*" yakni pertumbuhan yang tidak diikuti peningkatan signifikan dalam kesempatan kerja (Listari et al., 2024). Dalam kasus seperti ini, pertumbuhan tinggi justru meningkatkan ketimpangan karena keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh pemilik modal besar. Literatur pembangunan menegaskan bahwa sektor-sektor padat karya, UMKM, dan industri kreatif memiliki dampak lebih besar dalam penyerapan tenaga kerja. Dalam perspektif syariah, hal ini sesuai dengan prinsip pemberdayaan umat, di mana sektor ekonomi yang melibatkan banyak tenaga kerja dinilai lebih memberikan kemaslahatan.

Selain isu kemiskinan dan pengangguran, studi empiris juga menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki peran besar dalam menentukan sejauh mana pertumbuhan ekonomi berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Di negara-negara Muslim, perkembangan keuangan syariah terbukti memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini kurang tersentuh oleh lembaga keuangan konvensional. Bank Indonesia, misalnya, mencatat bahwa peningkatan indeks inklusi keuangan syariah berkorelasi positif dengan penurunan kemiskinan ekstrem di berbagai wilayah. Hal ini terjadi karena produk-produk keuangan syariah seperti pembiayaan mikro, qardhul hasan, dan akad mudharabah memberi peluang usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun demikian, penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua pertumbuhan ekonomi menghasilkan peningkatan inklusi keuangan syariah. Pada wilayah dengan literasi keuangan rendah, pertumbuhan cenderung hanya meningkatkan aktivitas ekonomi formal tanpa menyentuh masyarakat yang berada di sektor informal (Harahap, 2024). Kurangnya pemahaman tentang

produk keuangan syariah membuat sebagian masyarakat enggan memanfaatkan layanan perbankan, sehingga mereka tetap berada dalam lingkaran kemiskinan struktural. Studi empiris di Asia Selatan menyebutkan bahwa peningkatan literasi keuangan sebesar 10 persen dapat meningkatkan akses pembiayaan syariah hingga 6 persen, yang kemudian berpengaruh langsung pada kesejahteraan rumah tangga.

Jika dilihat berdasarkan data lintas negara (cross-country), hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan semakin menunjukkan pola yang kompleks. Negara-negara Asia Timur misalnya, berhasil menurunkan kemiskinan secara besar-besaran karena pertumbuhan mereka disertai kebijakan redistributif, investasi pada pendidikan, dan pengembangan UMKM (Asathori et al., 2025). Sementara itu, beberapa negara Timur Tengah memiliki PDB per kapita sangat tinggi, tetapi tingkat ketimpangan pendapatan tetap lebar karena minimnya diversifikasi ekonomi. Dalam perspektif syariah, kondisi ini menunjukkan perlunya integrasi antara pertumbuhan dengan nilai-nilai keadilan distributif agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh umat.

Penelitian-penelitian empiris di Indonesia memberikan gambaran menarik mengenai dinamika tersebut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi nasional meningkat stabil sekitar 5 persen dalam satu dekade terakhir, penurunan angka kemiskinan berjalan cukup lambat. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pertumbuhan masih belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat berpendapatan rendah. Sektor-sektor yang tumbuh pesat seperti industri digital dan komoditas tambang cenderung berorientasi pada modal besar, sehingga tidak menciptakan dampak luas terhadap pemerataan. Kajian syariah menegaskan bahwa pertumbuhan yang tidak meningkatkan kesejahteraan kelompok bawah adalah pertumbuhan yang tidak berkualitas.

Di sisi lain, penelitian oleh berbagai akademisi ekonomi syariah menemukan bahwa keuangan mikro syariah memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin. Lembaga-lembaga seperti BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) terbukti mampu memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah, murah, dan sesuai nilai-nilai syariah dibanding institusi konvensional. Studi tahun terbaru menunjukkan bahwa pembiayaan BMT meningkatkan pendapatan UMKM sekitar 20–30 persen dalam dua tahun pertama, yang berdampak langsung pada penurunan kerentanan ekonomi keluarga (Ulfa, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan inklusi keuangan syariah menjadi faktor penting untuk memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata.

Temuan empiris juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat. Negara dengan kelembagaan lemah biasanya memiliki kebocoran anggaran, praktik korupsi, serta alokasi sumber daya yang tidak efisien, sehingga pertumbuhan tidak menghasilkan pemerataan. Dalam kerangka syariah, tata kelola yang amanah (*good governance*) menjadi prasyarat utama dalam memastikan bahwa sumber daya publik dikelola secara adil dan tidak dimonopoli oleh pihak tertentu. Dengan tata kelola yang baik, pertumbuhan ekonomi dapat dikonversi menjadi peningkatan kualitas hidup, akses layanan publik, dan jaminan sosial bagi seluruh umat.

## Kesimpulan

Hasil kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari indikator pendapatan nasional seperti PDB, PNB, dan pendapatan per kapita memang mampu memberikan gambaran umum mengenai aktivitas ekonomi suatu negara, namun indikator-indikator tersebut belum cukup untuk merepresentasikan kondisi kesejahteraan umat secara komprehensif. Perspektif ekonomi syariah menekankan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh peningkatan nilai agregat produksi, tetapi juga oleh keadilan distribusi, pemerataan akses, dan pemenuhan tujuan maqashid al-syariah. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan kerangka pengukuran ekonomi konvensional dengan prinsip-prinsip syariah agar evaluasi pembangunan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tingkat falah atau kemaslahatan masyarakat.

Telaah integratif dalam penelitian ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi baru akan bermakna bila memberikan dampak nyata pada penurunan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan inklusi keuangan syariah, serta penguatan instrumen distribusi seperti zakat, infaq, dan wakaf. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan pembangunan yang ideal adalah model yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berorientasi pada keberlanjutan, keadilan, dan kemaslahatan umat. Pendekatan integratif antara indikator pendapatan nasional dan prinsip ekonomi syariah, sebagaimana ditawarkan dalam penelitian ini, berpotensi menjadi kerangka evaluasi pembangunan yang lebih adil, komprehensif, dan selaras dengan nilai-nilai Islam, sehingga mampu menjawab kesenjangan antara idealitas konsep kesejahteraan dan realitas pencapaiannya di masyarakat.

## Referensi

- Agustina, N. H., Khoiroh, I., Badiuzzaman, M. Z., & Aini, S. P. N. (2024). Kontribusi ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 2(2), 91–103. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i2.542>
- Aulia, N. A., Widyaningtias, R., & Rahmania, D. S. (2024). Pengaruh pembangunan ekonomi Islam terhadap kesejahteraan masyarakat Islam di Indonesia. *Islamic Economics and Business Review*, 3(3). <https://doi.org/10.59580/iesbir.v3i3.7011>
- Anzaikhan, M., Nasir, M., Zulkarnaen, Z., Drajat, A., Rafiqah, R., & Umam, C. (2025). Teologi ekonomi Islam: Konstruksi prinsip ilahiyah menuju aktualisasi bermuamalah. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 177–192. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i1.10785>
- Asathori, F. R., Khasanah, H. R., Faradisi, I. S., & Ngadhimah, M. (2025). Sistem pendidikan modern di Asia: China, India, Korea Selatan. *Marifatuna: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 1(3). <https://ejournal.merivamedia.com/index.php/meriva>

- Harahap, S. (2024). Peran ekonomi syariah dan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 12(2).
- Marcas, I. A. F., Oentoro, Y. P., & Yasin, M. (2024a). Pertumbuhan ekonomi sebagai cerminan perkembangan perekonomian suatu negara. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(3), 40–47. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.1898>
- Marcas, I. A. F., Oentoro, Y. P., & Yasin, M. (2024b). Pertumbuhan ekonomi sebagai cerminan perkembangan perekonomian suatu negara. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(3), 40–47. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.1898>
- Karimah, A. R., Kholida, A. D., Fajar, M. S., Kusna, M. D. L., & Hidayati, A. N. (2025). Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di Asia. *Kampus Akademik Publishing*, 3(5). <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i5.4639>
- Kholifah, A. N., & Andini, C. T. (2024). Peran UMKM terhadap perekonomian di Indonesia.
- Rangkuti, L. R. (2024). *Hardware digital banking syariah: Tantangan dan solusi*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14475248>
- Listari, S. E., Pasaribu, S. H., & Novianti, T. (2024). The impact of information and communication technology (ICT) development on youth unemployment in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 13(2), 93–104. <https://doi.org/10.29244/jekp.13.2.2024.93-104>
- Malahati, F., B, A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami karakteristik penelitian sebagai metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
- Algifari, M. A. (2024). *Maqasid syariah dalam pengembangan ekonomi Islam (Analisis komprehensif dan implementasi)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali konsep maqasid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Syahrin, M. A., Arifin, M., & Luayyin, R. H. (2022). Kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi syariah. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 1(2), 95–105. <https://doi.org/10.46773/v1i2.395>
- Ulfa, Z. R. (2023). Analisis pengaruh jumlah uang beredar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. *Independent: Journal of Economics*, 3(3).
- Widana, G. O. (2024). Analisa strategi peningkatan pendapatan zakat, infaq, dan sedekah di Kota Batam di era perkembangan teknologi digitalisasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>